



Peningkatan Pemahaman Demokrasi Dalam Menghadapi Pemilu Bagi Generasi Muda Pada Program Studi PPKn di Universitas Abulyatama

Asih Winarty^{1*}, Akhyar¹, Hasanah¹, Silvi Puspa Widya Lubis¹, Muhammad Hadid Al Hafitz¹

¹Universitas Abulyatama

*Email korespondensi: asihwinarty_ppkn@abulyatama.ac.id¹

Diterima 28 Februari 2023; Disetujui 28 Maret; Dipublikasi 31 April 2023

Abstract: This article is intended to explain the increasing understanding of democracy in dealing with elections for the younger generation. The method used is qualitative with a phenomenological approach. Abulyatama University was used as the object of research. The source of the data was obtained from the students of the University of Abulyatama, the PPKn Study Program. Collecting data using interviews, observation, and documentation. Implementation of increasing understanding of democracy in dealing with elections for the younger generation through four steps, namely planning, implementation, monitoring, and evaluation. The four steps in increasing understanding of democracy in facing elections for the younger generation at Abulyatama University have been carried out well. There is one step that needs to be implemented in order to increase understanding of democracy in dealing with elections for the younger generation at Abulyatama University, namely conducting a consultation stage for students of the Civics Study Program. If this application is not able to find a solution, then the reverse pattern is applied, namely from the PPKn study program lecturers

Keywords : Management, Democraton, Election, Young Generation

Abstrak: Tulisan ini dimaksud untuk menjelaskan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Universitas Abulyatama dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data diperoleh dari mahasiswa/mahasiswi Universitas Abulyatama Program Studi PPKn. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda melalui empat Langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Empat Langkah pada peningkatan paham demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda di Universitas Abulyatama sudah dilakukan dengan baik. Ada satu Langkah yang perlu diterapkan guna meningkatkan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda di Universitas Abulyatama, yaitu melakukan tahapan konsultasi mahasiswa program studi PPKn. Jika penerapan ini kurang mampu menemukan solusi, maka diterapkan pola yang terbalik, yaitu dari para dosen program studi PPKn.

Kata kunci : Demokrasi, Pemilu, Generasi Muda

Sejarah mencatat bahwa pemuda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali

peristiwa sejarah menunjukkan aksi nyata pemuda bagi kemajuan bangsa. Sejaksebelum proklamasi kemerdekaan hingga sekarang,

setiap tragedi penting tidak bisa dipisahkan dari pemuda. Sumpah pemuda pada 1928 adalah bukti satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Melihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pening pertumbuhandan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pada umur itu pemuda memiliki semangat yang tinggi dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Memiliki idealism dan keinginan untuk senantiasa berkembang. Tidak mudah putus asa dan senantiasa mencoba hal-hal baru.

Sikap rela berkorban, sikap mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan, sikap pekerja keras, sikap menjunjung tingi persatuan, sikap berani dan sikapantang menyerah adalah sikap yang bisa kita temui pada diri pemuda. Negara demokrasi menempatkan pemuda sebagaisubjek dari pemerintahan, bukan seperti negara monarki atau negara komunis yang cenderung otoriter dan menepatkan pemuda sebagai objek pemerintahan. Karena pemuda sebagai subjek dari pemerintahan maka semakin tinggi partisipasi pemuda dipemerintahan, negara akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Itu artinya partisipasi pemuda menjadi salah satu kunci dari kualitas demokrasi. Indonesia menempatkan pemuda sebagai subjek dari

pemerintahan. Maka pemuda harus hadir dalam setiap peroses demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 dan dalam setiap momentum pemilu, rakyat dalam hai ini adalah pemuda wajib berperan sebagai subjek yang mengawasi proses pemilu. Sehingga pemilu bisa berjalan sesuai dengan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Momentum pemilu 2019 telah memberi pelajaran kepada kita bahwa masyarakat kita masih belum sepenuhnya dewasa dalam berdemokrasi. Praktek demokrasi kita juga belum sepenuhnya ideal, pemilu 2019 baru saja lewat orang-orang sudah bersiap untuk 2024.

Para pemuda yang dalam hal ini adalah kelompok yang dianggap menjadi penyambung lidah antara elit dengan alit. Bisa menjadi kelompok yang mengkampanyekan pemilu tanpapraktek jual beli suara. Praktek jual beli suara itu yang menjadi salah satu akar masalah tindakan korupsi para pejabat. Bia menjadi kelompok yang menjaga kondusifitas media social. Jangan sampai media social bertebaran konten –konten yang mengarahkan masyarakat untuk saling terpecah belah.media social sangat rentan dijadikan sebagai alat oleh orang-orang

tak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan seperti black campaign atau kampanye hitam.

Para pemuda mampu mempengaruhi pemuda lain untuk menyadari bahwa pada pemilu 2024 nanti adalah pesta demokrasi yang menjadi sarana kedaulatan rakyat. Akhirnya peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat berarti bagi demokrasi kita. Maju atau mundurnya demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh pemudanya. Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi pemuda untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan ditengah maraknya praktek politik uang. Dan segala pelanggaran pemilu tidak akan ada artinya karena sejak dini kita telah mempersiapkan generasi muda yang sadar akan pentingnya pemilu yang berintegritas.

Indonesia telah memasuki dua decade demokratisasi terhitung sejak digulirkannya era reformasi pada 1998. Agenda utama dari reformasi politik pada waktu itu adalah menciptakan iklim politik demokratis yang tidak hanya menyerap aspirasi seluruh warga tetapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini hal tersebut dirasakan belum optimal, salah satu penyebabnya adalah kualitas para pemilih yang masih rendah dimana sebagian dari mereka masih ada yang terlibat dalam praktik jual beli suara

(*vote buying*). Selain itu, pola hubungan klientilistik antara elite-elite partai dan konstituen juga terdorong terjadinya mobilisasi isu-isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) dalam pemilu demi memenangkan kandidat (Allen, 2015). Upaya untuk menyadarkan masyarakat pemilih tentang tujuan dari demokrasi yakni terciptanya tatanan politik yang menyejahterakan dirasakan urgen untuk dilakukan. Potensi kerawanan social pada pemilu di Aceh menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami makna dari pemilu dalam system politik demokrasi.

KAJIAN PUSTAKA

Pada subbab ini diuraikan teori dan penelitian relevan dengan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda di program studi PPKn Universitas Abulyatama.

Menurut C.F Strong, demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh system perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam

suasana terjaminnya kebebasan politik (Winarno, 2014)

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut system demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat (Winarno :114).

Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah, karena prinsip demokrasi ini keputusan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia no.42 Tahun 2008, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu:

- a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka di

Peningkatan Pemahaman Demokrasi.....

(Winarty, dkk., 2023)

negara atau daerah tempat mereka berdomisili dan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi (Ibid :82)

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau PILKADA secara langsung pula baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pelaksanaan PILKAD berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana pasangan calon peserta pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Agustino, 58:2009).

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut system demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Selain dari definisi di atas Morris (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara

atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari system pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status social yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih atau pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa

ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahsiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bersifat fenomenologis, yaitu mengidentifikasi sebuah aktifitas sosial dan persoalan manusia. Metode kualitatif diperlukan untuk mendeskripsikan fenomenologis yang menjelaskan pemaknaannya secara umum (Sugiyono, 2010).

Penerapan pendekatan kualitatif berkaitan dengan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda pada program studi PPKn di Universitas Abulyatama. Sumber data penelitian adalah mahasiswa dan dosen Program Studi PPKn di Universitas Abulyatama. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kevaliditasan data, maka perlu menggunakan Teknik triangulasi pada sumber data

dan pada analisis data menggunakan Teknik analisis induktif melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan ini dibahas adalah peningkatan pemahaman demokrasi dalam pemilu bagi generasi muda pada program studi PPKn di Universitas Abulyatama, berikut penjelasannya langkah-langkah yang dimaksud.

PERENCANAAN

Di dalam perencanaan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda pada program studi PPKn di Universitas Abulyatama sudah melakukan penelitian dengan mahasiswa program studi PPKn beserta dosen PPKn dilingkungan Universitas Abulyatama. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh perwakilan mahasiswa PPKn Mardalina bahwasannya dalam peningkatan pemahaman demokrasi dalam mengadapi pemilu bagi generasi muda sudah sangat memadai, bagaimana yang sudah disampaikan bahwa para dosen prodi PPKn di lingkungan Universitas Abulyatama menanamkan pemahaman mengenai demokrasi tersebut cukup memadai untuk membuat mahasiswa menjadi paham dan tidak golput dalam pemilu yang akan mendatang. Selain itu Ibu dosen program studi PPKn juga menambahkan beberapa hal dalam proses peningkatan pemahaman demokrasi yakni didalam memberikan wadah seperti organisasi agar hak mahasiswa dalam berorganisasi bisa berkembang. Tapi kebebasan tersebut bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, yakni

kebebasan yang tidak mengganggu hak orang lain. Dan di dalam organisasi tersebut di buat aturan sesuai dengan tujuan dan visi misi organisasi.

Sebagai pengajar memiliki tanggung jawab dalam sikap pengembangan dalam hal kebebasan mengembangkan pendapat, dimana banyak mahasiswa yang belum dapat mengemukakan pendapat, untuk itu motivasi yang diberikan adalah untuk mau bertanya dan menjawab. Mahasiswa diberikan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lembaga-lembaga, dengan cara memberikan hak menyampaikan aspirasi untuk pemilihan pejabat kampus seperti mengumpulkan apa keinginan mahasiswa dan bagaimana kriteria pemimpin yang terbaik.

Mengembangkan sikap kesamaan derajat dengan pemberian hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Harus terbukanya organisasi-organisasi untuk mngembangkan/membina mahasiswa. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan diri. Aktifitas apapun diberikan hak yang sama sehingga mahasiswa jadi sadar dan mau saling percaya. Sikap toleransi dengan melakukan kegiatan bersama-sama yang melibatkan seluruh wadah organisasi, membiasakan hidup bersama-sama dengan berbagai kelompok tapi tidak menyebabkan konflik. Menghormati pendapat dan kegiatan yang dilakukan organisasi yang lain dan setidaknya bisa mendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut serta mengembangkan sikap taat kepada hukum.

Cara dosen dalam mengembangkan

sikap demokrasi mahasiswa dalam kebebasan mengemukakan pendapat yang dapat dipraktikkan ketika sesi tanya jawab dalam diskusi. Dimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya baik berupa sanggahan maupun dukungan mengenai diskusi yang disajikan.

Namun dosen juga memiliki kendala dalam mengembangkan sikap demokratis mahasiswa, kendala yang dihadapi oleh dosen dalam pengembangan sikap-sikap demokratis mahasiswa yaitu dosen ingin mengembangkan sikap demokratis, tetapi lingkungan tidak memberikan contoh yang baik, terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan oleh dosen dengan yang ada lingkungan. Sebagai contoh mengenai taat terhadap hukum, dosen memberi tahu kepada mahasiswa bahwa kita harus taat terhadap hukum, tetapi pada kenyataannya di masyarakat terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan oleh dosen dengan apa yang ada di lingkungan.

Misalnya dosen memberi tahu bahwa pemerintah itu harus dipercaya oleh rakyatnya, tetapi pada kenyataannya pemerintah banyak yang korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan mahasiswa bingung antara apa yang dijelaskan oleh dosen didalam kelas dengan apa yang terjadi di lingkungan tidak sesuai. Jadi, itu yang menyebabkan mahasiswa tidak percaya terhadap dosen, karena yang ditemukan mahasiswa masyarakat dengan apa yang dijelaskan oleh dosen didalam kelas berbeda dengan teori yang

disampaikan oleh dosen.

Solusi yang dilakukan oleh dosen dalam menghadapi kendala tersebut yaitu:

1. Menerapkan pendidikan demokrasi kepada mahasiswa khususnya melalui pembelajaran di dalam kelas.
2. Dosen sebagai model yang dicontoh oleh mahasiswa harus memberikan teladan yang baik agar mahasiswa mempunyai sikap yang baik pula. Contohnya dosen harus menghargai mahasiswa agar mahasiswa dapat menghargai mahasiswa yang lain, jangan sampai mahasiswa merasa dilecehkan karena dimarahi oleh dosen di depan banyak orang. Hal itu akan menimbulkan rasa dendam di dalam diri mahasiswa terhadap dosen. Mengkondisikan lingkungan yang demokratis.

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu pada generasi muda pada program studi PPKn di Universitas Abulyatama para dosen program studi PPKn melakukan bimbingan kepada mahasiswa dengan berbagai cara pelaksanaan, yakni diantaranya para dosen PPKn yang memegang mata kuliah Pendidikan Politik dan Demokrasi Pancasila menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pemahaman bahwa betapa pentingnya demokrasi dalam menghadapi pemilu.

Di Program Studi PPKn Universitas Abulyatama mempunyai tiga tahapan yang dilakukan dosen yang pertama adalah setiap masuk mengajar para dosen akan menyelipkan

pemahaman-pemahaman mengenai demokrasi dan tentang kebebasan berpendapat dalam pemilu. Yang artinya sebagai warga negara Demokrasi kita bebas mengemukakan pendapat kita atas pemilihan kepala negara atau presiden serta wakil presiden maka tahap kedua adalah mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam pemilihan komting kelas atau pemilihan ketua himpunan mahasiswa, dan apabila dalam pemilihan-pemilihan kecil dikampus juga tidak berjalan dengan lancar maka memakai tahap ketiga yakni para dosen membuat sosialisasi mengenai pentingnya demokrasi dan pentingnya peran mahasiswa atau generasi muda dalam pemilihan umum (pemilu).

Di dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda pada program studi PPKn di Universitas Abulyatama tidak hanya dosen dengan mata kuliah demokrasi pancasila yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi dalam pemilu namun semua dosen di prodi PPKn ikut memberikan pemahaman-pemahaman kebebasan berpendapat di negara Indonesia dalam menghadapi pemilu mendatang. Mengenai pelaksanaan peningkatan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu di masa yang akan datang biasanya para dosen memberikan sosialisasi kepada mahasiswa karena dengan sosialisai pemahaman-pemahaman mengenai pemilu pun dapat menambah wawasan kepada mahasiswa. Dalam penanaman pemahaman nilai-nilai demokrasi ini juga seharusnya sudah ditanamkan sedari para mahasiswa mahasiswi masih duduk di bangku sekolah, namun kekurangannya banyak guru

PPKn di sekolah kurang dalam menanamkan betapa pentingnya demokrasi bagi generasi muda. Sebab didalam masyarakat kita masih menganggap sepele hal tersebut, banyak yang beranggapan bahwa generasi muda tidak terlalu perlu ikut serta dalam pemilihan umum, bahkan banyak generasi muda sekarang tidak diikutkan dalam pemilihan kepala desa di daerah mereka sebab dianggap suara mereka tidak akan mengubah apapun. Maka dari itu sering kita lihat di masa sekarang, banyak generasi muda yang kurang berani memberikan pendapat mereka sebab ketika mereka memberi kritik dan saran terhadap pemerintahan, kritik mereka seakan diabaikan dan dianggap tidak penting. Oleh karena itu peran para dosen di lingkungan universitas dianggap sangat penting untuk membangun generasi muda penerus bangsa yang berani mengemukakan pendapat, tidak menjadi generasi muda penerus bangsa yang hanya menerima tertindas dan tidak bisa menyuarakan pendapat mereka.

PENGAWASAN

Di dalam penanaman pemahaman nilai-nilai demokrasi terhadap generasi muda dalam menghadapi pemilu kita tidak luput dari yang namanya pengawasan, dalam penanaman pemahaman demokrasi kunci utama pengawasan adalah salah satu konsep dan kunci utama untuk menunjang pembelajaran dan sosialisasi dalam menanamkan pemahaman demokrasi bagi generasi muda, di program studi PPKn Universitas Abulyatama mengenai pentingnya suara generasi muda dalam pemilihan umum di masa sekarang maupun di masa yang akan datang terutama para dosen program studi PPKn

di Universitas Abulyatama melakukan pengawasan dengan secara bertahap dan sudah terkonsep rapi.

Pengawasan ini tidak hanya dilakukan dosen mata kuliah tertentu saja namun ada juga pengawasan dosen mata kuliah lain di program studi PPKn, pengawasan ini bertujuan agar penanaman pemahaman demokrasi pada generasi muda dalam menghadapi pemilu mampu menjadikan para mahasiswa sebagai generasi muda menjadi melek terhadap pemerintahan di Negara Indonesia

EVALUASI

Di dalam beberapa fungsi penanaman pemahaman demokrasi bagi generasi muda dalam menghadapi pemilu adalah agar para generasi muda seperti mahasiswa yang sudah bisa mengikuti pemilu paham bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Fungsi evaluasi ini bisa menengok bagaimana seberapa jauh keberhasilan kita dan seberapa jauh kegagalan kita dalam melakukan penanaman pemahaman demokrasi kepada generasi muda dalam menghadapi pemilu.

Evaluasi penanaman pemahaman demokrasi bagi generasi muda dalam menghadapi pemilu bagi mahasiswa program studi PPKn di Universitas Abulyatama, sudah sering melakukan program evaluasi ini baik pengevaluasian mingguan, pengevaluasian harian, maupun pengevaluasian bulanan. Biasanya dosen melakukan pengevaluasian mingguan bertujuan mengevaluasi mahasiswa melihat satu persatu karakter dari pada

mahasiswa apakah sikap demokrasi mulai muncul atau masih kurang berani mengemukakan pendapatnya.

Sedangkan pengevaluasian mingguan ini bertujuan agar dosen mengetahui mahasiswa mana yang sudah paham makna demokrasi dan siswa mana yang mulai paham bahwa pentingnya melakukan pemilihan dalam pemilu mendatang, bagaimana sikap perubahan dari minggu ke minggu yang sudah dilakukan pendekatan pemahaman demokrasi kepada generasi muda dalam menghadapi pemilu apakah anak itu sudah mulai berani mengemukakan pendapatnya, sebab jika banyak generasi muda yang belum berani mengemukakan pendapat maka tak akan ada perubahan bagi negara. Maka dosen melakukan evaluasi mingguan untuk memastikan mahasiswa paham atau tidak mengenai pentingnya demokrasi dalam menghadapi pemilu mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui penerapan pemahaman demokrasi bagi generasi muda dalam menghadapi pemilu program studi PPKn Universitas Abulyatama di terapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui sudah dilaksanakannya empat langkah dalam pemahaman demokrasi kepada generasi muda dalam menghadapi pemilu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Setiap langkah dilakukan langkah bertahap dan berjenjang bila dosen mata kuliah demokrasi Pancasila tak menemukan solusi maka akan diserahkan kepada dosen Program Studi PPKn yang memegang mata kuliah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamad, Sanusi. 1984. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Bandung: Tarsito, 1984
- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Allen, K.D., Golightly, Y.M. 2015. Epidemiology of Osteoarthritis: state of the evidence. *Curr Opin Rheumatol*, 27(3), 276-283
- Bakti Setiawan Dian, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- MENDIKBUD No. 025/0/1995
- Gadjong Andi, Agussalim (2007). Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gautama, Sudargo. 1983. Pengertian tentang Negara Hukum, Bandung: PT Alumni.
- Morissan. 2005. Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Sarbaini, 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Waega Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume III Nomor 1. Hal. 107
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta